

OTT di Kolaka Timur, Tim KPK Tangkap Bupati Andi Merya Nur

JAKARTA (IM) – Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara (Sulteng). Informasinya, Bupati Andi Merya Nur, salah satu yang ditangkap.

“Infonya demikian (Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur ditangkap OTT),” ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri saat ditanya wartawan di Jakarta, Rabu (22/9).

Tim KPK melakukan OTT di Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, pada Selasa (21/9) pukul 20.00 Wita.

Ali mengatakan, para pihak yang ditangkap dan diamankan KPK masih dalam proses permintaan keterangan oleh tim KPK di Mapolda Sulawesi Tenggara dan kemudian diterbangkan ke Jakarta untuk pemeriksaan lanjutan di Gedung KPK Merah Putih pukul 14.00 Wita. Baca juga: Polda Sultra Benarkan Bupati Kolaka Timur Terjerat OTT KPK

Sementara itu, Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, hingga saat ini pihaknya masih melakukan pendalaman kepada pihak-pihak yang diamankan dalam OTT tersebut.

“Betul, tadi malam KPK

melakukan giat tangkap tangan di Provinsi Sultra. KPK menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah memberikan dukungan peran untuk pemberantasan korupsi,” ujar Firli melalui keterangan pers.

“Tunggu ya, dan berikan waktu untuk penyidik menyelesaikan pekerjaannya,” ucapnya.

Firli menyampaikan bahwa KPK terus berkomitmen melakukan pemberantasan korupsi dan tidak pernah berhenti sampai Indonesia bersih dari praktik-praktik korupsi.

“Siapa pun pelakunya, kami tidak pandang bulu jika cukup bukti, karena itu prinsip kerja KPK,” katanya.

Ia mengatakan, KPK bekerja dengan berpedoman pada asas-asas pelaksanaan tugas KPK, di antaranya menjunjung tinggi kepastian hukum, keadilan, kepentingan umum, transparan, akuntabel, proporsionalitas, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

“Tolong berikan waktu untuk kami bekerja, nanti pada saatnya KPK pasti memberikan penjelasan secara utuh setelah pengumuman keterangan dan barang bukti sudah selesai,” ucap Firli. ● mei

FOTO: ANI



PEMBATASAN PINTU MASUK INTERNATIONAL JALUR LAUT

Sebuah kapal cepat rute Batam Centre - Singapura melaju pelan di dekat Pelabuhan Internasional Batam Centre Batam, Kepulauan Riau, Rabu (22/9). Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membatasi pintu masuk internasional untuk perjalanan jalur laut hanya melalui pelabuhan Batam dan Nunukan (Kalimantan Utara) dalam rangka mengantisipasi masuknya varian baru Virus Corona, termasuk Varian Mu (B.1.621).

Jaksa Agung Minta Perangkat Digital Terkait Intelijen Aman dan Tak Bocor

JAKARTA (IM) - Jaksa Agung Sanitair Burhanuddin meminta seluruh perangkat digital terkait fungsi intelijen aman dan tidak bocor. Ia meminta pengadaan teknologi informasi di kejaksaan harus sesuai kaidah atau ketentuan yang berlaku.

“Tolong pastikan perangkat digital kejaksaan aman, tidak ada kebocoran,” kata Burhanuddin saat membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Bidang Intelijen, dikutip dari siaran pers, Rabu (22/9).

Ia mengingatkan seluruh personel bidang intelijen harus memiliki kesadaran keamanan dan dapat menerapkan sistem pengamanan informasi yang kuat pada sistem perangkat intelijen.

Kesiapan sumber daya manusia (SDM) bidang intelijen untuk beradaptasi dengan kecepatan perkembangan teknologi merupakan hal yang penting.

“SDM merupakan kunci dan peran utama dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas intelijen. Tanpa dukungan SDM yang memiliki kapasitas unggul dan berintegritas, kegiatan intelijen tidak akan berjalan dengan baik,” ucapnya.

Burhanuddin mengungkap, perkembangan teknologi informasi berdampak pada perubahan modus operandi kejahatan. Kejahatan kerap terjadi dengan memanfaatkan kelemahan teknologi informasi.

Hal ini, kata Burhanuddin, telah mengubah pola pengungkapan dan pola pembuktian kejahatan.

Karena itu, aparat penegak hukum harus siap berhadapan dan menggunakan alat bukti atau barang bukti digital untuk mengungkap

dan membuktikan suatu kejahatan.

“Bidang intelijen tentunya harus mampu mengembangkan laboratorium digital forensik yang memenuhi standar dan kualifikasi internasional, sehingga keberadaan laboratorium digital forensik kejaksaan benar-benar mampu memberi dukungan, baik dari sisi perangkat, SDM dan legalitasnya,” ujarnya.

Selain itu, ada pula ancaman keamanan dan ketertiban serta potensi gangguan terhadap ketuhanan NKRI lewat informasi hoaks yang beredar di media sosial.

Hal ini disebabkan makin mudahnya masyarakat mengakses berita dari berbagai sumber. Akibatnya, informasi begitu mudah tersebar tanpa tersaring.

Burhanuddin pun berharap Bidang Intelijen Keajaung dapat melakukan sinergi tugas dan fungsi dengan instansi intelijen lainnya dalam wadah komunitas intelijen demi mendukung pelaksanaan tugas intelijen negara yang cepat dan tepat.

Selain itu, ia juga meminta jajaran bidang intelijen memahami dinamika perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. ● mei

PENGUMUMAN
Untuk memenuhi persyaratan dalam Pasal 125 ayat 7 dan Pasal 127 ayat 2 dan 8 dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi PT AGUNG INTI INDONESIA (dahulu bernama PT PANIH AGUNG INTI INSURANCE AGENCY), berkedudukan di Jakarta Pusat (“Perseroan”), dengan ini mengumumkan telah dilakukan jual beli saham milik PT MAGNA LAND dalam Perseroan oleh Ny. Susan Widjaja yang mengakibatkan perubahan pendanaan dalam Perseroan.
Maka dengan ini diberitahukan kepada seluruh kreditur dan pihak-pihak lain yang mengajukan keberatan atas pengambilalihan saham-saham tersebut agar disampaikan dalam waktu selambatnya 14 hari sejak tanggal pengumuman ini dengan ditunjukkan kepada:
PT AGUNG INTI INDONESIA (dahulu bernama PT PANIH AGUNG INTI INSURANCE AGENCY)
Jl. Jend. Sudirman No. 1
Gd. Panin Bank Center, Gelora, Tanah Abang 10270
Up. Direksi
Jakarta, 23 September 2021
Direksi Perseroan, Direksi PT MAGNA LAND,
Ny. Susan Widjaja

2 Polhukam

IDN/ANTARA



RAKER KOMISI I DPR DENGAN MENKOMINFO

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate (kiri) mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (22/9). Rapat tersebut membahas penyesuaian RKA-K/L Kemkominfo Tahun Anggaran 2022.

Anggota DPR Desak Kemenkominfo Tutup Konten Penghinaan Agama dan Ras di Internet

Kemenkominfo dinilai baru membatasi peredaran konten pornografi dan pornoaksi. Sementara konten-konten penghinaan agama masih banyak beredar di internet.

JAKARTA (IM) - Anggota Komisi I DPR Al Muzammil Yusuf mendesak agar pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) segera menutup konten-konten berisi penghinaan agama dan ras yang banyak beredar di internet.

Muzammil berpandangan, sejauh ini Kemenkominfo baru membatasi peredaran konten pornografi dan pornoaksi, belum memasuki ranah penghinaan agama yang menu-

rutnya sangat sensitif. “Menurut saya Kominfo tidak cukup hanya pada konten pornografi, segera berkinerja dengan menghina apapun agama di Indonesia atau rasial untuk segera ditutup,” kata Muzammil dalam rapat Komisi I DPR dengan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate, Rabu (22/9).

Politikus Partai Keadilan Sejahtera itu memantapkan, konten-konten yang dibuat

oleh tersangka kasus dugaan penistaan agama Muhammad Kece yang masih beredar di dunia maya. Padahal, menurut Muzammil, penghinaan dalam konten-konten tersebut sudah sangat vulgar dapat mengadu domba dua agama.

Ia mengatakan, penutupan konten-konten menghina agama dan ras itu juga sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, serta Pasal 29 UUD 1945 yang mengatur kehidupan beragama.

“Saya kira ini sangat-sangat strategis, sangat penting. Saya minta mulai hari ini, Pak Menteri, kolega saya pada periode lalu, dengan segala hormat untuk melakukan itu sesegera mungkin demi keabadian bangsa dan negara,” ujar Muzammil.

Merespons desakan tersebut, Johnny mengatakan tidak ada tempat bagi penghinaan agama di Indonesia. Ia pun menyebutkan, sejak Agustus 2018 hingga 21 September 2021, Kemenkominfo telah melakukan pemutusan akses terhadap 2.624.750 konten negatif dengan total konten SARA yang diputus aksesnya sebanyak 1.901 konten.

“Patroli siber dan pemutusan akses terus dilakukan terhadap konten yang diduga mengandung unsur muatan kebencian suku, ras, antargolongan, dan agama, termasuk di dalamnya penistaan agama,” ujar menteri yang juga merupakan politikus dari Partai

Nasdem. Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono sebelumnya mengingatkan masyarakat agar tetap tenang atas perkara dugaan penistaan agama yang dilakukan Youtuber Muhammad Kece. Dia menegaskan, Polri akan menyelesaikan kasus ini secara profesional.

“Yakini bahwa Polri akan menuntaskan peristiwa ini secara profesional. Lalu, kepada masyarakat agar tetap tenang dengan adanya peristiwa ini, tidak melakukan tindakan-tindakan kontraproduktif,” kata Rusdi dalam konferensi pers yang disiarkan secara daring, Senin (23/8) lalu. ● han

Tak Ada WNI Jadi Korban Gempa M 6,0 di Melbourne

JAKARTA (IM) - Gempa bumi berkekuatan magnitudo (M) 6,0 mengguncang wilayah sekitar Kota Melbourne, Australia, Rabu (22/9). Geoscience Australia mengatakan, pusat gempa berada di dekat pedesaan Mansfield, sekitar 200 kilometer timur laut Melbourne, dan berada pada kedalaman 10 km.

Gempa kuat itu menyebabkan kerusakan dan padamnya listrik di beberapa bagian Melbourne. Namun, gempa tidak menimbulkan ancaman tsunami di daratan atau pulau di wilayah Australia.

Stasiun radio 3AW memposting gambar puing-puing di jalan di Melbourne yang dikaitkan dengan gempa. Warga di bagian utara kota mengatakan di media sosial jika listrik padam akibat gempa.

Biro Meteorologi negara itu dalam sebuah pernyataan mengatakan tidak ada ancaman tsunami yang dikeluarkan ke daratan, pulau atau wilayah Australia.

Menurut keterangan Konsulat Jenderal Republik Indo-

nesia (KJRI) Melbourne yang mengumpulkan informasi dari simul-simpul masyarakat, sejauh ini tidak ada warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban gempa tersebut.

“KJRI Melbourne segera menghubungi simul-simpul masyarakat dan hingga saat ini tidak terdapat laporan adanya WNI yang menjadi korban gempa,” demikian disampaikan Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (PWNI-BHI) Kemlu RI Judha Nugraha dalam keterangannya, Rabu (22/9).

Berdasarkan database KJRI Melbourne, terdapat sekitar 17.500 WNI yang menetap di wilayah akreditasi KJRI Melbourne yang mencakup negara bagian Victoria dan Tasmania.

Bagi WNI yang memerlukan bantuan dapat segera menghubungi nomor-nomor kontak KJRI Melbourne: +61 477007075 (Hotline KJRI Melbourne), +61 414252564 (sdr. Budi Winarto), +61 433919884 (sdr. Alfons), dan +61 426638351 (sdr. Sugihartono). ●

Tiga Pegawai KPK Kembali Barang Sitaan ke Koruptor Hanya Dihukum Teguran Tertulis

JAKARTA (IM) - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjatuhkan hukuman teguran tertulis kepada tiga pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (22/9).

Ketiga pegawai KPK itu yakni Ristanta, Hengky dan Eri Angga Permana, mereka dinyatakan terbukti bersalah menyerahkan barang sitaan ke koruptor. Ketiganya terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku pasal 7 ayat 1 huruf c peraturan Dewan nomor 2 tahun 2020 tentang penegakan kode etik dan pedoman perilaku KPK.

“Menghukum terperiksa Ristanta, Hengky dan Eri Angga Permana masing-masing dengan sanksi ringan berupa teguran tertulis I dengan masa berlaku hukuman selama tiga bulan,” ujar Anggota Dewan sekaligus Ketua Majelis, Harjono, dalam sidang secara daring, Rabu (22/9).

Dewas menyatakan Ristanta, Hengky dan Eri Angga Permana terbukti bersalah karena telah melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku berupa kunjungan ke lapis kelas I Tangerang pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 tanpa dilengkapi surat tugas dan atau izin atasan.

“(Kunjungan itu) untuk mengembalikan barang sitaan rutan KPK kepada warga binaan Leonardo Susminarta Prasetyo dan melakukan pertemuan dengan warga binaan lainnya sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 1 huruf c peraturan dewan pengawas nomor 2 tahun 2020 tentang penegakan kode etik dan perilaku KPK,” jelasnya.

Dalam pertimbangannya, Dewas menyebut hal-hal yang memberatkan ketiga pegawai KPK itu telah menyalahgunakan pengaruh dan kapasitasnya sebagai pegawai anti rasuah untuk memperoleh fasilitas kunjungan di Lapas klas I Tangerang tanggal 4 Mei 2021.

“Para terperiksa mengetahui terdapat larangan kunjungan bagi warga binaan kecuali aparat penegak hukum dalam masa pandemi Covid-19 berdasarkan surat edaran dirjen pemyasarakan Kemkumham RI nomor PAS-20.PR0101 Tahun 2020 tentang langkah progresif dalam penanggulangan penyebaran virus corona disease covid 19 pada unit pelaksana teknis pemyasarakan,” kata Harjono. “Yang meringankan, para terperiksa mengakui dan menyesali perbuatannya,” katanya menambahkan. ● han



PENANGANAN COVID-19 DI INDONESIA Mendapat Apresiasi Dunia
Pengunjung mencuci tangannya sebelum masuk ke Mall BTM, Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu (22/9). Data dari John Hopkins University menyebutkan penanganan COVID-19 di Indonesia diapresiasi sebagai salah satu yang terbaik di dunia karena mampu menurunkan angka kasus hingga minus 58 persen dalam kurun waktu dua minggu.